

**IMPLEMENTASI *GREEN SMART VILLAGE* DI DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DESA
(DESA BANYUANYAR KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI)**

Elida Suci Hermayanti, Teguh Yuwono

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Today, villages in Indonesia need to be developed into a smart village. According to the mandate of Law No. 6 of 2014, the village has the authority to regulate village affairs through the allocation of village funds. It aims to develop the potential of the village and realize the welfare of society through Village Development. One of the innovative steps in conducting Village development can be done with the implementation of *Green Smart Village* concept as done by the government of Banyuanyar village, Ampel subdistrict, Boyolali district. In addition to developing the potential of the village as a form of community welfare, the program also supports the *Smart City* program that has been launched by the government of Boyolali district. This research aims to determine the implementation of *Green Smart Village* in Banyuanyar village and supporting factors as well as the implementation factor of the program. Efforts to address problems and research objectives were conducted using the implementation theory of George Edwards III. The study uses *mixed methods*, where data is obtained through interviews, data/archives, and questionnaires. The results showed that the idea of *Green Smart Village* is an effort to explore the potential of the village, the implementation of *Green Smart Village* realized through the provision of free internet access for the community of Banyuanyar Village, the development of digital library facilities, government services of IT-based village, and the development of integrated livestock and agriculture field. The result of infrastructure development has improved, but in terms of the economic program is still not able to reach the entire village community. Through research concluded that of the four indicators of the implementation theory of George Edwards III, two of which have been implemented well namely the indicator of communication and disposition. Two other indicators are the indicator of resources and bureaucracy structure still there is a shortage of human resources both implementing and village community, the source of funds that are still lacking to support the activities of *Green Smart Village*, in addition to the indicator bureaucratic structure has no special management structures that run the program.

Key Words: *Green Smart Village*, implementation, Village development

PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan tingkat terendah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional serta stabilitas nasional. Di era globalisasi ,

kemandirian dan daya saing daerah menjadi kunci kesuksesan pemerintah daerah. Dengan adanya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur mengenai kewenangan urusan desa ditambah dengan

adanya alokasi dana desa dapat membuka peluang bagi setiap desa di Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa. Desa perlu dikembangkan menuju desa cerdas. Salah satu langkah inovatif dalam pembangunan desa dapat dilakukan dengan penerapan konsep *green smart village*.

Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali merintis desa berbasis teknologi informasi yang pertama di Boyolali. Desa Banyuanyar mengawali penerapan program *green smart village* dengan tujuan membangun masyarakat yang paham teknologi. Tidak hanya demi meningkatkan kualitas SDM saja, akan tetapi dengan adanya *green smart village* diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintah desa dengan berbasis IT. Program ini juga mendukung program *smart city* yang dicanangkan oleh Kabupaten Boyolali. Disamping itu hal-hal yang unik dari penerapan *green smart village* ini selain menjadi satu-satunya desa yang menerapkan konsep *green smart village* di Kabupaten Boyolali, program ini juga telah mampu menggerakkan potensi lokal desa seperti dibidang peternakan dan perkebunan dimana banyak dari masyarakat setempat berprofesi

sebagai peternak dan petani. Peternak dan petani tersebut mampu berinovasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu dengan adanya pengolahan bidang peternakan dan pertanian terpadu menjadikan Desa Banyuanyar memiliki produk unggulan yang sekaligus mendukung program kementerian desa yaitu *one village one product*.

Dalam kajian ilmu pemerintahan, dapat dilihat bahwa implementasi dari suatu program maupun kebijakan sangat penting untuk diteliti, implementasi menjadi tahapan paling penting didalam struktur kebijakan. Tahapan ini akan menentukan apakah pemerintah benar-benar dapat menghasilkan output dan outcome sesuai yang telah direncanakan.

Penelitian ini dilakukan guna menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pembangunan desa melalui konsep *green smart village* dan peran aktor di dalamnya?
- 2) Bagaimana implementasi *green smart village* di dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Banyuanyar sesuai dengan teori George Edwards III?
- 3) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi *green smart village* di Desa Banyuanyar?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian campuran (mixed method). Dimana penelitian ini dilakukan di Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi, serta kuesioner.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Pembangunan Desa Melalui Konsep *Green Smart Village*

Pembangunan desa dengan prinsip *green smart village* merupakan perpaduan dari dua konsep yaitu *Smart Village* dan *Green Village*. Desa Banyuanyar, sebagai desa yang menerapkan pembangunan desa melalui konsep *green smart village* dinilai telah menunjukkan peningkatannya. Sesuai dengan tujuannya dimana dalam membangun desa melalui konsep *green smart village* tidak hanya berfokus pada kecanggihan teknologi saja. Hal yang paling utama yaitu bagaimana dengan menerapkan konsep ini mampu mengubah masyarakat Desa Banyuanyar menjadi lebih baik dan sejahtera, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk selalu berinovasi dalam mengembangkan usaha kecil yang berpotensi untuk menciptakan kewirausahaan, serta

meningkatkan kualitas pelayanan di desa agar dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan masyarakat.

Sesuai dengan Undang – Undang Desa No 6 Tahun 2014, secara detail menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sejalan dengan pendapat Adisasmita sasaran umum pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi :

1) Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar diseluruh wilayah.

Pada periode pertama kepemimpinan Bapak Komarudin beliau berfokus pada pembangunan infrastruktur desa. Infrastruktur ini dinilai sebagai bentuk pemenuhan pilar – pilar *smart village*. Sesuai dengan paradigma “Desa Membangun” prinsipnya adalah desa memiliki kewenangan salah satunya kewenangan nyata untuk mengelola *public goods* seperti jalan desa,

kesehatan, pendidikan, air bersih dan lain – lain. Prioritas pemerintah desa dalam membangun infrastruktur desa yaitu jalan desa disambut baik oleh masyarakat Banyuanyar. Hal ini dikarenakan dapat mempermudah segala aktivitas masyarakat desa sehingga kegiatan perekonomian atau kegiatan sosial dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain infrastruktur jalan, ketersediaan air bersih juga menjadi salah satu prioritas dalam penggunaan dana desa, musim kemarau berkepanjangan membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Boyolali tidak hanya di Desa Banyuanyar saja yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih.

Selanjutnya, salah satu penunjang dari keberhasilan *green smart village* adalah penerapan teknologi komunikasi di dalamnya. Sadar akan pentingnya kemajuan teknologi, pemerintah Desa Banyuanyar membangun fasilitas internet gratis bagi seluruh masyarakat desa tersebut. Program ini telah dijalankan hingga tahun 2019 sudah ada 21 titik *wifi hotspot* yang tersebar di 19 RT di seluruh Desa Banyuanyar. Fasilitas *wifi hotspot* (internet gratis) dinilai sebagian masyarakat sangat bermanfaat untuk menunjang segala aktivitas mereka, baik untuk kegiatan ekonomi, kegiatan pendidikan serta kegiatan administrasi pemerintah desa.

Sesuai dengan misi pemerintah Desa Banyuanyar yaitu meningkatkan kualitas masyarakat dan transparansi berbasis Teknologi , Informasi, dan *Smartphone* (*Digital Village*). Salah satu tujuan penerapan konsep *green smart village* Desa Banyuanyar harapannya dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintah desa dengan berbasis IT. Pada kenyataannya Desa Banyuanyar sendiri belum memaksimalkan manfaat IT (Wifi gratis) dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena Pemerintah Desa Banyuanyar belum memiliki aplikasi pelayanan digital yang memanfaatkan fasilitas akses internet gratis. Pelayanan surat menyurat hanya sebatas berbasis komputer, sehingga masyarakat tetap harus mendatangi kantor kepala desa untuk meminta surat administrasi yang diperlukan. Ini berarti salah satu tujuan diterapkannya *green smart village* yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintah desa belum tercapai. Selanjutnya salah satu upaya untuk memenuhi prinsip *digital village*, pemerintah Desa Banyuanyar juga telah memiliki website desa. Dewasa ini website desa memang penting karena dapat digunakan sebagai media pelayanan publik , sebagai manajemen informasi desa, sekaligus juga bentuk transparansi penyelenggaraan

pemerintah desa. Website desa yang berbasis online dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi desa tersebut.

Didalam laman website tersebut terdapat informasi umum mengenai profil desa yang meliputi visi misi, sejarah desa, perangkat desa, demografi penduduk, dan anggaran desa. Selain itu terdapat pula informasi mengenai potensi desa, APBDes, alokasi dana desa, pariwisata desa, galeri desa, serta cara mengurus berkas kependudukan. Di dalam website tersebut juga terdapat laman “Lapor Lurah” dimana masyarakat Desa Banyuanyar dapat melaporkan keluhan kepada pemerintah desa. Kendala perangkat desa yang belum memiliki kemampuan untuk mengelola website desa masih menjadi penyebab utama mengapa website desa belum digunakan secara optimal.

Selain memberikan fasilitas internet gratis secara merata di sejumlah titik di Desa Banyuanyar. Pemerintah desa juga berupaya untuk meningkatkan minat baca dan bejalar bagi masyarakat setempat dengan memberikan fasilitas perpustakaan digital. Perpustakaan digital ini dilengkapi dengan 10 unit komputer, sebuah proyektor, serta tambahan akses internet. Namun niat baik pemerintah desa untuk dapat meningkatkan minat baca kepada masyarakat desa

Banyuanyar belum mendapat respon yang baik. Hal ini dikarenakan sepi pengunjung yang datang ke perpustakaan. Selain itu anak-anak yang datang ke perpustakaan cenderung lebih memilih mengakses internet gratis dibandingkan membaca buku.

2) Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber- sumber penghasilan , produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Sejak disahkannya Undang - Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan desa menjadi subyek pelaku pembangunan. Maka dari itu warga desa memiliki wewenang penuh dalam menjalankan pembangunan desa tersebut. Paradigma “Desa Membangun” berbeda dengan paradigma “Membangun Desa”. Dengan adanya prinsip kemandirian inilah memungkinkan warga desa untuk menentukan prioritas dan visi pembangunan yang dirumuskan melalui musyawarah desa. Hal ini bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan desa melalui program – program yang dapat meningkatkan perekonomian. Sehingga untuk mendorong aktivitas ekonomi desa perlu adanya partisipasi masyarakat. Peningkatan

ekonomi desa , tidak hanya dilakukan oleh pejabat desa akan tetapi seluruh masyarakat wajib untuk berkontribusi.

Penelitian di lapangan menemukan bahwa ada 3 sektor yang menopang ekonomi masyarakat Desa Banyuanyar yaitu sektor pertanian, sektor peternakan , dan sektor industri kreatif. Melalui pelatihan dan pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat, pemerintah Desa Banyuanyar berhasil mengembangkan produk unggulan. Program *one village one product* yang digagas oleh Kementerian Desa PDTT memiliki tujuan untuk mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat desa. Ada pelatihan – pelatihan yang diberikan kepada kelompok tani dan ternak. Pelatihan bagi kelompok tani yaitu dilakukan dari kegiatan pembibitan, penanaman, hingga pasca panen. Sebagai perwujudan konsep *green smart village*, Desa Banyuanyar menerapkan sistem terintegrasi dalam pengolahan hasil peternakan dan pertanian. Terintegrasi juga berarti mengelola secara mandiri. Kegiatan pelatihan yang telah dimulai pada tahun 2015 kini telah memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan kelompok tani dan ternak juga kepada masyarakat Desa Banyuanyar. Hal ini ditandai dengan berdirinya unit usaha yang dapat menopang perekonomian masyarakat

desa, diantaranya unit usaha yang dikelola oleh KTT Sido Makmur yaitu :

- 1) Unit Pengolahan Kopi
- 2) Unit Pembibitan Kopi
- 3) Unit Pakan Konsentrat
- 4) Unit Pengolahan Susu
- 5) Unit Pengolahan Limbah

Program *green smart village* ini tentu menghasilkan keuntungan bagi kelompok tani dan ternak, akan tetapi tidak semua KTT berhasil mengembangkan produk. Di Banyuanyar sendiri ada 13 KTT akan tetapi hanya beberapa kelompok yang dapat berinovasi. Pendapat itu juga dibenarkan oleh Bapak Sumeri selaku ketua Gapoktan Desa Banyuanyar, memang dengan adanya pembangunan desa melalui program *green smart village* maka kelompok tani dan ternak berperan sangat penting. Walaupun sebagian besar penduduk Desa Banyuanyar berprofesi sebagai petani dan peternak akan tetapi ada masyarakat desa yang bukan bekerja di bidang tersebut sehingga beliau tidak yakin bahwa program ini mampu mensejahterakan seluruh warga desa.

3) Terciptanya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan arti pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya

upaya nyata untuk menganggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.

Didalam pembangunan desa melalui konsep *green smart village*, pemerintah desa tidak hanya berupaya untuk menggali potensi desa untuk menciptakan peningkatan ekonomi akan tetapi juga berupaya untuk menata lingkungan hijau di desa tersebut. Menurut hasil penelitian di lapangan pemerintah desa telah berupaya untuk mewujudkan program – program pelestarian lingkungan sesuai dengan konsep *green smart village* salah satunya yaitu penggunaan biogas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya biogas merupakan hasil pengolahan bidang peternakan dan pertanian terpadu. Dimana kotoran sapi dari para peternak diubah menjadi *bio energy* untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari masyarakat. Sedangkan untuk pengolahan sampah rumah tangga, sejauh ini yang menjadi permasalahan adalah pengolahan sampah yang masih dilakukan secara mandiri sehingga belum memenuhi standar ketentuan peraturan.

Peran Aktor – Aktor yang Terlibat dalam *Green Smart Village* Desa Banyuanyar

Dalam menjalankan sebuah inovasi program pembangunan desa khususnya

pembangunan desa dengan konsep *green smart village*, pemerintah desa tidak dapat bekerja sendiri. Kerja sama dan kolaborasi ini dilakukan agar inovasi yang dijalankan dapat berjalan dengan optimal. Bapak Komarudin selaku kepala desa memiliki peran penting dalam program *green smart village*, dimana beliau yang menciptakan ide pembangunan desa melalui konsep *green smart village*. Sedangkan aktor pelaksana yang memegang peran dominan yaitu pemerintah desa bersama BUMDes , hal ini karena segala kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan – pelatihan dilaksanakan oleh kedua aktor tersebut. Meskipun begitu peran Gapoktan dan masyarakat desa juga berpengaruh karena keterlibatan mereka akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa melalui *green smart village*.

Variabel yang Mempengaruhi Implementasi *Green Smart Village* Menurut Teori George Edwards III

1. Komunikasi

Pelaksanaan pembangunan desa melalui konsep *green smart village* melibatkan banyak pihak, sehingga komunikasi antar pelaksana sangat penting. Sejalan ini komunikasi antar pelaksana sudah baik, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. setiap perencanaan program,

apapun itu kegiatannya pemerintah desa selalu melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, begitu juga dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dirasa perlu dilakukan mengingat tujuan pembangunan juga untuk kesejahteraan masyarakat desa. keterlibatan masyarakat ini diwujudkan dalam kegiatan musrenbang dan kumpulan – kumpulan yang rutin dilaksanakan. Menurut George Edwards III tiga hal penting yang harus ada dalam indikator komunikasi dapat dijelaskan lebih rinci dalam uraian berikut:

Transmisi, pembangunan desa melalui konsep *green smart village* telah dijalankan sesuai dengan arahan kepala desa sehingga harapannya tujuan dan sasaran dapat dicapai. Bentuk penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisai dimana kegiatan tersebut dianggap sebagai salah satu kunci keberhasilan *green smart village*.

Kejelasan, bentuk sosialisasinya pun beragam seperti contoh sosialisasi manfaat internet, ini dilakukan karena pemerintah desa telah membangun fasilitas yaitu internet gratis melalui pemasangan wifi hotspot yang menjangkau seluruh desa. Harapannya masyarakat akan menggunakan fasilitas tersebut untuk menunjang aktivitas kegiatan yang memiliki manfaat baik. Penyampaian informasi melalui sosialisasi mengenai *green*

smart village pada akhirnya berdampak baik bagi keterlibatan aktif masyarakat didalam program tersebut.

Komitmen, masukan atau ide – ide dari pelaksana atau masyarakat mereka sampaikan melalui musrenbang dan pertemuan lainnya. Selain itu pemerintah desa juga terus menjalankan kegiatan sosialisasi berupa pencerdasan kepada masyarakat hingga sekarang ini. Pihaknya mengaku bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka kuncinya adalah tidak lelah memberikan pencerdasan kepada masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting di dalam tahapan implementasi, sumber daya disini baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Permasalahan sumber daya manusia, BUMDes sebagai pelaksana dari program *green smart village* merasa sangat sulit untuk mencari pengurus yang mau dan mampu bekerja di BUMDes itu sendiri. BUMDes terus berupaya untuk mengajak masyarakat agar lebih meningkatkan kegiatan unit usaha dan produksinya. SDM masyarakat Desa Banyuwangor masih rendah, hal ini karena ada beberapa masyarakat yang belum mau untuk menanam kopi. Masyarakat masih

membutuhkan contoh melalui pelatihan – pelatihan mengenai manfaat dari kopi dan cara menanam kopi dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa pemerintah desa sering mengadakan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan. Desa Banyuanyar masih terkendala SDM, hal ini dapat dilihat dengan perangkat desa yang hanya beberapa paham teknologi. Pengelolaan website yang belum maksimal adalah akibat dari kurangnya perangkat desa yang memiliki kemampuan tersebut. Dan tidak adanya masyarakat yang menggunakan aplikasi “ lapor lurah” juga akibat dari masyarakat yang belum sepenuhnya melek teknologi. Selain sumber daya manusia, dana dan fasilitas yang merupakan sumber daya non manusia juga sangat penting. Dalam hal fasilitas, pemerintah desa telah berupaya untuk memenuhi fasilitas sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan desa seperti jalan desa, wifi gratis di sejumlah titik di Desa Banyuanyar, pembangunan gedung untuk produksi usaha, pembangunan perpustakaan digital, dan pembangunan kantor BUMDes dilakukan pemerintah desa guna membantu pelaksanaan program tersebut. Walaupun begitu ada beberapa fasilitas yang menurutnya pemanfaatannya masih kurang, seperti perpustakaan digital. Walaupun ketersediaan fasilitas dan dana telah

digunakan secara maksimal akan tetapi menurut Bapak Komarudin dana yang tersedia masih kurang. Seperti dana untuk membeli hasil dari petani belum mencukupi jika harus membeli semuanya. Masih banyak hasil dari petani itu terjual ke tengkulak pasar yang selisih harganya sangat jauh. Selain itu untuk mewujudkan Desa Banyuanyar untuk menjadi desa wisata masih perlu perbaikan dan penambahan fasilitas untuk menunjang hal tersebut, akan tetapi masih terkendala dana.

3. Disposisi

Di awal dimulainya program ini tentu ada pro dan kontra dari masyarakat, hal ini sangat wajar tetapi pemerintah desa sebagai orang yang mencanangkan dan memberikan ide untuk kemajuan desa harus bertanggung jawab dengan cara memberikan sosialisasi, memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Setelah adanya sosialisasi dari pemerintah desa membuat masyarakat menjadi paham sehingga mendukung program tersebut. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa sekarang beberapa masyarakat mulai ikut berpartisipasi dengan menanam kopi. Ini merupakan dukungan yang baik dari masyarakat. Komitmen pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan peran merupakan faktor yang mendukung implementasi *green smart*

village. Mereka juga memiliki komitmen untuk kedepannya tetap melaksanakan kegiatan – kegiatan sesuai dengan tugasnya. Seperti BUMDes yang terus melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui pelatihan sehingga dapat menghasilkan produk – produk lain yang dapat menjadi kegiatan usaha masyarakat Desa Banyuwangi. Dan kelompok tani ternak yang akan tetap melaksanakan kegiatan di bidang produksi pengolahan sapi dan kopi melalui kerja sama BUMDes dibidang promosi sehingga kedepannya hasil produk – produk olahan dari Desa Banyuwangi dapat dikenal oleh masyarakat luas.

4. Struktur Birokrasi

Di Desa Banyuwangi pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh seluruh elemen desa tersebut. Baik pemerintah desa, GAPOKTAN, BPD, BUMDes, dan kelompok- kelompok lain di dalam masyarakat. Akan tetapi peran pemerintah desa. BUMDes dan GAPOKTAN lebih menonjol di dalam implementasi *green smart village* ini. Berkebalikan dengan pemerintah desa, BUMDes dan GAPOKTAN belum memiliki struktur kepengurusan yang jelas hingga sekarang ini. BUMDes sendiri sekarang ini belum memiliki struktur kepengurusan yang baik. Hanya pengurus inti seperti Ketua,

Sekertaris, dan Bendahara saja, untuk yang lainnya belum ada. Hal ini terjadi karena, struktur kepengurusan BUMDes berkarya masih sering terjadi pergantian. Disamping itu juga masyarakat Desa Banyuwangi banyak yang belum mau menjadi pengurus di BUMDes, sehingga hal ini berdampak pada SDM (staff) BUMDes yang kurang. Hal yang sama juga terjadi pada organisasi GAPOKTAN , banyak kelompok yang tidak berjalan aktif hanya sekedar nama kelompok saja. Tidak ada struktur kepengurusan yang jelas, mereka hanya sekedar mengadakan kegiatan pertemuan rutin saja. Dalam hal ini berarti belum ada struktur kepengurusan khusus yang menjalankan program pembangunan desa dengan konsep *green smart village*. Selain struktur kepengurusan, SOP atau pedoman dalam pelaksanaan implementasi *green smart village* juga harus ada. Untuk pelaksanaan pembangunan desa melalui konsep *green smart village* telah tertuang dalam RPJM Desa Banyuwangi tahun 2019 - 2025. Akan tetapi belum ada pedoman yang mengatur secara jelas mengenai pelaksanaan program ini. Hanya saja pelaksana mengikuti arahan dari pemerintah desa untuk menjalankan program tersebut. Pembagian tugas juga telah sesuai dengan peran masing – masing pelaksana. Seperti pemerintah desa yang

berfokus pada pelayanan dan penyedia fasilitas, BUMDes sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dan membantu di bidang pemasaran produk, sedangkan Gapoktan berfokus pada produksi susu dan kopi. Walaupun begitu koordinasi antar pelaksana rutin dilakukan, sehingga didalam ada pertukaran gagasan dan ide serta arahan dalam pelaksanaan implementasi *green smart village*.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi *Green Smart Village* Desa Banyuwangi

Terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan implementasi *green smart village* tersebut. Faktor yang pertama adalah komitmen dari pelaksana program, pemerintah desa bersama dengan BUMDes dan GAPOKTAN terus melakukan sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat desa, mulai dari pemahaman terkait program *green smart village* itu sendiri hingga ke pelatihan pengolahan produk usaha. Selanjutnya dukungan dan bantuan dari pemerintah atau instansi lain juga merupakan faktor pendukung keberlangsungan dari program ini. Seperti di dalam konsep pembangunan desa “Desa Membangun” bahwa pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Hal ini sesuai dengan kenyataan dilapangan bahwa instansi

seperti BPTP Jawa Tengah dan dinas – dinas terkait sering memberikan bantuan berupa alat dan bahan sebagai penunjang produksi, selain itu juga memberikan sosialisasi sesuai dengan program *green smart village*.

Sedangkan kendala utama pelaksanaan program ini adalah sumber daya manusia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya beberapa pelaksana baik dari pemerintah desa, BUMDes, GAPOKTAN, dan masyarakat desa sendiri masih terkendala disumber daya manusianya. Pemerintah desa hanya beberapa yang paham teknologi dengan baik, selain itu belum ada perangkat yang khusus menangani masalah website desa dan layanan “lapor lurah”. Selanjutnya BUMDes, permasalahannya adalah belum memiliki struktur kepengurusan yang baik. Masyarakat desa yang dirasa belum memiliki inisiatif sendiri untuk menanam kopi. Selain sumber daya manusia, sumber daya non manusia dalam hal ini dana dan fasilitas, juga menjadi faktor penghambat dalam kegiatan dalam program ini. Anggaran untuk membeli hasil petani belum mencukupi, karena hasil produksinya sangat banyak sehingga memerlukan anggaran yang besar.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembangunan desa dengan konsep *green smart village* diwujudkan melalui penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat Desa Banyuanyar, pembangunan fasilitas perpustakaan digital, pelayanan pemerintah desa berbasis IT, serta pengembangan bidang peternakan dan pertanian yang terintegrasi. Melalui konsep *green smart village*, pembangunan desa di beberapa aspek sudah membaik seperti pembangunan infrastruktur yaitu jalan desa, wifi gratis bagi masyarakat desa, dan fasilitas untuk melakukan kegiatan unit usaha. Dari segi pembangunan ekonomi, meskipun tidak semua masyarakat desa meningkat pendapatannya akan tetapi program *green smart village* mampu mendorong peningkatan pendapatan para anggota kelompok tani dan ternak lewat kegiatan produksi pengolahan kopi dan susu.
2. Secara keseluruhan pelaksanaan *green smart village* didalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Banyuanyar sudah cukup baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa tersebut. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat diantaranya perbaikan jalan desa semakin baik, akses internet gratis selama 24 jam, pelatihan terkait

pengolahan kopi dan susu sebagai basis potensi ekonomi desa, serta pengolahan kopi dan susu sebagai unit usaha desa. Dilihat dari empat indikator teori implementasi George Edwards III , dua diantaranya telah dilaksanakan dengan baik yaitu indikator komunikasi dan disposisi. Dua indikator lainnya yaitu indikator sumber daya dan struktur birokrasi masih terdapat kekurangan yaitu pada SDM baik pelaksana maupun masyarakat desa tersebut, sumber dana yang masih kurang untuk menunjang kegiatan *green smart village* , selain itu pada indikator struktur birokrasi belum ada struktur kepengurusan khusus yang menjalankan program tersebut.

3. Faktor pendukung dari pelaksanaan pembangunan desa melalui *green smart village* yaitu komitmen pelaksana program dan komunikasi antar pelaksana. Sedangkan faktor penghambat implementasi *green smart village* adalah sumber daya pelaksana serta ketersediaan dana yang masih kurang.

SARAN

1. Keberlanjutan program *green smart village* juga harus diikuti dengan perbaikan struktur birokrasi pelaksana sehingga SDM yang menjalankan

program tidak kurang dan kinerjanya lebih efektif. Selain itu juga peraturan yang mengatur pelaksanaan *green smart village* juga lebih diperjelas sehingga pelaksana bekerja sesuai dengan arahan dan aturan yang ada.

2. Peningkatan sarana dan prasarana dibutuhkan untuk lebih menunjang implementasi *green smart village* didalam upaya meningkatkan pembangunan desa. Sehingga anggaran dana untuk pelaksanaan *green smart village* perlu ditambah.
3. Mengembangkan pola pikir bahwa program *green smart village* merupakan program yang baik untuk kesejahteraan masyarakat sehingga perlu adanya keterlibatan masyarakat. Seharusnya masyarakat lebih aktif untuk melaksanakan program tersebut. Seperti ikut menanam kopi di pekarangan rumah dan ikut terlibat dalam produksi pengolahan kopi dan susu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, L. (2014). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa , dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik* , 2.
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide , Misi, dan Semangat Undang - Undang Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa - Desa di Indonesia. *IPTEK-KOM* , 5.
- Kadave, P., Phatak , P., & Pawar, S. (2012). Planning and Design of Green-village. *International Journal of Electronics , Communications & Soft Computing Science & Engineering*, 10 - 14.
- Subarsono. (2010). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Grafindo.
- Widjaja, P. D. (2010). *Otonomi Desa*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.